

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat telah tercantum dalam tujuan Negara Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik Tahun 2017 jumlah penduduk Negara Indonesia adalah 261.890.900 jiwa dengan jumlah penduduk yang belum sejahtera saat ini adalah 25.674.580 (BKKBN, 2019). Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa diukur berdasarkan kriteria dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang terdiri dari 5 tingkat sejahtera yaitu Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Tahap Keluarga Sejahtera I, Tahap Keluarga Sejahtera II, Tahap Keluarga Sejahtera III, dan Tahap Keluarga Sejahtera Tahap Keluarga Sejahtera Plus.

Dalam mengurangi masyarakat yang kurang sejahtera, seharusnya pemerintah membantu masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui gerakan pemberdayaan, dalam UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah dijelaskan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual, sosial serta material setiap warga Negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu untuk mengembangkan diri, sehingga mampu untuk melaksanakan fungsi sosialnya”. Peraturan lainnya juga terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa penyelenggara kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta memulihkan fungsi sosial masyarakat untuk mencapai kemandirian.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Untuk memberikan kesejahteraan pada keluarga, pemerintah juga memiliki kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang menyatakan bahwa Gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga melalui organisasi PKK. PKK merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam rangka mewujudkan keluarga yang beriman, sehat, dan sejahtera dengan menggunakan 10 program pokok yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, sandang, pangan, perumahan dan pelaksanaan rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan yang baik, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat.

PKK merupakan gerakan membantu pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan pemahaman mengenai nilai agama dan moral, memberikan penjelasan mengenai program Keluarga Berencana (KB), serta membantu masyarakat pra sejahtera dengan mengembangkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Shalfiah, 2013).

Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat berhasil, namun dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan yang terjadi, seperti angka pra sejahtera yang terjadi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta angka pra sejahtera yakni: Jakarta Timur ada 3,46 persen, Jakarta Barat ada 1,02 persen, Jakarta Pusat ada 1,71 persen, Jakarta Utara 2,76 persen, dan Jakarta Selatan

2,86 persen (Lova, 2019). Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara merupakan salah satu sarana yang memiliki gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau anggota dalam melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, material.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Rahmawati (2019) dengan judul penelitian *Implementasi Program Kerja PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah*, menyatakan bahwa program PKK mampu meningkatkan taraf hidup keluarga dengan dilatih untuk hidup mandiri dengan menciptakan usaha baru untuk ibu rumah tangga. Program PKK cukup membantu meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga menjadi bukti bahwa program PKK meningkatkan taraf pangan dan sandang keluarga.

Selanjutnya menurut Shalfiah (2013) dengan judul penelitian *Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-program Pemerintahan Kota Bontang*. Hasil penelitian menemukan bahwa fasilitator untuk mendukung program pemerintah kota Bontang belum optimal dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program PKK dan banyaknya masyarakat yang belum memahami program tersebut diperlukannya sosialisasi atau penyuluhan kembali agar program pemerintah dapat berjalan. Hal itu tentu perlunya gotong royong berupa bekerja sama antara pemerintah dan anggota PKK sehingga dapat menciptakan kesejahteraan pangan dan sandang

Penelitian lainnya yang ditulis oleh Nurfadillah (2019) dengan judul penelitian *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program UP2K-PKK di Desa Kayuambon Lembang* menyatakan bahwa untuk program PKK dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat cukup berhasil, karena bisa membuat masyarakat meningkatkan pendapatannya dengan membuat usaha seperti rumah lumpia, pembuatan keripik singkong, keripik pisang, kue basah, kue kering, atau bahkan bibit tanaman.

Selanjutnya berdasarkan Rosni (2012) dengan Judul penelitian *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara* menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat nelayan dari 66 responden dinyatakan miskin karena penghasilan yang masih jauh di bawah UMK. Hal itu tentu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan bantuan modal ataupun keterampilan lain.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *Peningkatan Kesejahteraan Anggota melalui Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*

B. Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan anggota melalui program organisasi PKK.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus pada penelitian ini adalah terletak pada bagaimana peningkatan kesejahteraan anggota melalui program organisasi PKK yaitu Penghayatan dan Pengamalan Nilai Pancasila pada tahun 2019.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah peningkatan kesejahteraan anggota melalui program organisasi PKK?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan anggota untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Peningkatan Kesejahteraan melalui Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Organisasi PKK, dapat menjadi masukan atau evaluasi untuk lebih meningkatkan kesejahteraan melalui 10 program pokoknya dan khususnya pada program penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan program organisasi PKK dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

